

ETIKA DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: MENGHADAPI TUNTUTAN MASYARAKAT DI E-GOVERMENT

Prawiraharja¹, Reza Alfiani Latifah², Hayat³

¹Universitas Islam Malang

²Universitas Islam Malang

³Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

Kata Kunci:

Keadilan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas,

Keywords:

Justice, Public

Administration, Accountability



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

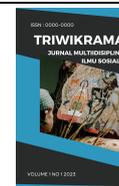
Etika dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam administrasi publik yang efektif dan dipercaya masyarakat. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan profesionalisme, peran etika dalam setiap aktivitas administrasi publik semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk mengulas pentingnya etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik, dengan fokus pada cara menghadapi ekspektasi publik di era modern seperti di e government. Melalui pendekatan teoritis dan empiris, artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip etis dan akuntabilitas birokrasi di e government dapat diterapkan dalam pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Studi kasus menunjukkan bahwa administrasi publik yang berlandaskan etika mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar dan tantangan dalam penerapan etika dan akuntabilitas

ABSTRACT

Ethics and accountability are the main pillars of effective and trusted public administration. With the increasing demands of society for transparency and professionalism, the role of ethics in every public administration activity is increasingly crucial. This article aims to review the importance of ethics and accountability in public administration, with a focus on how to deal with public expectations in the modern era. Through theoretical and empirical approaches, this article discusses how ethical principles and bureaucratic accountability can be applied in government to create quality public services. Case studies from various countries show that public administration based on ethics can increase public trust and prevent abuse of authority. By highlighting the basic principles and challenges in implementing ethics and accountability,

PENDAHULUAN

Etika akuntabilitas administrasi publik e government merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan, termasuk pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial, masyarakat menuntut standar yang lebih tinggi terhadap



integritas dan akuntabilitas aparatur negara. Masyarakat tidak hanya menuntut efisiensi dalam pelayanan, tetapi juga mengharapkan adanya perilaku etis dan transparansi dalam setiap aspek pengambilan keputusan di e government.

Namun, tantangan etis dalam administrasi publik sangat kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bukan sekadar nilai ideal, tetapi menjadi kebutuhan yang esensial untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, akuntabilitas, yang berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan kekuasaan, diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan administrasi publik dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya e government melakukan reformasi birokrasi masih menemui berbagai kendala karena menurut saya budaya organisasi dan sistem birokrasi masih kurang memiliki nilai komitmen, akuntabilitas, dan kejujuran. Kualitas sistem informasi dan aparatur juga menjadi titik lemahnya. Perlu dicatat bahwa perbaikan yang dilakukan masih bersifat marginal dan belum memberikan dampak yang diinginkan terhadap kehidupan birokrasi. Pelayanan publik menjadi kunci utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pelayanan yang berkualitas sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berimplikasi kepada tatanan birokrasi yang baik. Elemen mendasar dalam mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik. Tatanan birokrasi yang baik dapat dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan e government dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Tentunya perlu didukung dengan sumber daya manusia yang jujur, infrastruktur yang memadai, dorongan dan pengembangan agar sumber daya manusianya semakin termotivasi dan kompeten (Jufita & Meini, 2022). Hal ini juga memerlukan regulasi yang seimbang dalam mengatur sistem pemerintahan, serta kepemimpinan dengan standar yang tinggi untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang baik dalam struktur pemerintahan(Engkus et al., 2021).

Kurangnya inovasi dalam pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap ide pelayanan menjadi kendala utama dalam peningkatan pelayanan publik. Bagaimana mengembangkan layanan inovatif yang meningkatkan penawaran umum. Dapatkah inovasi layanan membantu mengatasi permasalahan pelayanan publik saat ini. Pelayanan publik yang baik dapat dicapai dengan pemerintahan demokratis yang luas dan bebas. Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam upayanya memperluas

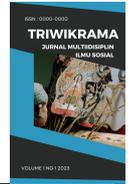


kapasitas pelayanan dan menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kebutuhan masyarakat (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).

Berdasarkan sumber data hasil survei KPPOD dan BKPM, Kota Yogyakarta Mempunyai persentase terbesar dari 10 kota dengan pelayanan perizinan terbaik pada tahun 2009 (74,6%), diikuti oleh Kota Banda Aceh (65,9%) dan sejumlah kota lainnya dengan persentase berkisar antara 60% hingga 45%. Pematang Siantar dengan persentase 41,1% menempati peringkat pelayanan perizinan terendah di antara sepuluh kota teratas. Kurangnya perbaikan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdampak pada hal ini. Padahal, inovasi yang dapat memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih baik diperlukan untuk meningkatkan beberapa bidang pelayanan publik. Dari tingkat tertinggi hingga terendah, organisasi pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan layanan yang signifikan (Nugroho et al., 2023). Peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik memberikan pembatasan terhadap pengulangan inovasi, sehingga gerak dinamis proses tersebut terkesan “kaku” dan terbatas.

Merupakan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Warga negara mempunyai hak-hak yang melekat, yang mencakup kemampuan untuk mengevaluasi hak-hak mereka, mencari perlindungan atas hak-hak tersebut, dan mengajukan tindakan hukum terhadap penyedia layanan. Adanya mekanisme suara dan pemberangkatan dapat membantu kinerja pelayanan publik. Exit menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih lembaga lain jika kualitas layanannya rendah. Sementara itu, mekanisme suara mempunyai peluang untuk mengevaluasi layanan yang ditawarkan kepada penyedia layanan. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah yang menerapkan inovasi pelayanan di bidang pendidikan, antara lain inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kabupaten Jembrana menerapkan beasiswa lengkap untuk seluruh siswa sekolah dasar, negeri, swasta, hingga sekolah menengah atas, sebagai bagian dari inovasi pendidikannya.

Di sisi lain, agar sumber daya pendidikan lebih berdaya saing, juga dilakukan implementasi paralel peningkatan kualitas instruktur. Bersama dengan sejumlah perkembangan lain yang berkaitan dengan institusi pemerintah, pertanian, tenaga kerja dan kependudukan, pertanian, perizinan, dan perekonomian. Kabupaten Sragen Menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan



pemerintah dan masyarakat, sekaligus memenuhi tuntutan dan harapan bersama (Mandey, 2016). Bagaimana etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Apa saja tantangan utama dalam penerapan etika dan akuntabilitas di sektor administrasi publik, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif dapat bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Data diambil dengan metode analisis data yaitu domine dan taksonomi. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori etika dalam administrasi public. Konsep faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi penerapan etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap teori etika administrasi publik.

PEMEBHASAN

Konsep Etika

Bahasa Yunani ethos, menjadi asal dari kata etika yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau watak. Etika juga bisa diartikan sebagai, kepercayaan manusia dan penegasannya yang dipelajari nilai-nilainya dalam suatu disiplin ilmu. Kemudian, etika juga diartikan sebagai persoalan utama dari disiplin ilmu itu sendiri untuk mengatur tingkah laku manusia yang berisi nilai-nilai hidup dan hukum-hukum (Solomon, 1987). Etika menjadi dasar tindakan seseorang yang sering berkaitan dengan prinsip-prinsip moral seseorang yang memiliki suatu profesi Menurut (Bartens, 2007) etika adalah kepercayaan suatu individu atau kelompok dalam menata tingkah lakunya melalui seperangkat nilai dan norma.

Perkembangan pengertian etika secara jelas dirumuskan oleh para etikawan (Wisok, 2009), yaitu: (1) ethics is the study of right and wrong. Etika merupakan pembelajaran tentang yang benar dan yang salah, artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan manusia. Etika dalam studi ini masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau perhatiannya hanya benar atau salahnya tindakan manusia berdasarkan peraturan yang berlaku. (2) ethics is a study of moral. Etika adalah pembelajaran mengenai moral dan tindakan manusia. Definisi ini secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologis dan antropologi



memberi pembatasan terhadap pandangan moral. (3) ethics is not the study of what is, but of what ought be. Etika bukan pembelajaran mengenai apa yang ada melainkan apa yang seharusnya.

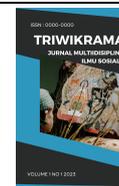
Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau suatu asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Etika mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu dalam kehidupan sosial maupun moral. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Kumorotomo, 2015).

Prinsip Etika Administrasi Publik

Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institute Josephon Amerika, antara lain: (1) jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit; (2) integritas, mempunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak bermuka dua; (3) memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan perjanjian sepihak; (4) setia, dan taat pada kewajiban yang semestinya dikerjakan; (5) adil, bertoleransi, menerima perbedaan serta open minded; (6) perhatian, memberikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan; (7) hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang; (8) kewarganegaraan, menghargai dan mendorong pembuatan keputusan yang demokratis; dan (9) keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan (Gie, 2006).

Akuntabilitas Publik

Berikut beberapa definisi yang disampaikan dalam sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan pemerintah. Dalam kamus Oxford, disebutkan bahwa “required or expected to given an explanation for one’s action” (Hornby, 1995). Akuntabilitas dibutuhkan atau diperlukan untuk memberikan deskripsi atas apa yang telah dilakukan. Dari definisi tersebut, dapat ditafsirkan bahwa akuntabilitas mengandung keharusan untuk menyediakan dan mengungkapkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada atasan. Accountability can be defined as the obligation to give answer and explanation, concerning one’s action and performance to those with right to require such



answer and explanation (Hamid, 1991). Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta individu dan organisasi bertanggung jawab atas kinerja yang diukur seobjektif mungkin. Subroto menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab menjelaskan prestasi dan tindakan seseorang atau pemimpin organisasi kepada mereka yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas penting dalam memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Tanggung jawab tidak abstrak tetapi konkret dan harus ditentukan oleh undang-undang dengan prosedur khusus tentang masalah tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Akuntabilitas ini tidak hanya dilaksanakan di organisasi atau institusi yang berada di tingkat atas, namun juga perlu disampaikan kepada organisasi di bawahnya termasuk kepada masyarakat.

Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki tujuan yang bersifat kompleks (Hulme & Turner, 1997). Akuntabilitas bertujuan untuk mengurangi berbagai patologi dalam sektor publik dan mempromosikan objektivitas dalam perubahan. Gagasan akuntabilitas dapat mengarahkan dan memberikan tekanan pada mereka yang bekerja di organisasi publik untuk lebih akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Indikator Akuntabilitas memiliki indikator sebagai berikut (Hulme & Turner, 1997): (1) legitimasi para pembuat kebijakan, menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi; (2) keberadaan moral yang memadai, kualitas moral dari para penyelenggara pemerintah sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi dan penyelewengan dalam organisasi; (3) kepekaan, menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kualitas pemerintah di masa depan; (4) keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses segala pihak termasuk masyarakat agar dapat menjamin bahwa aparatur pemerintah bertindak sesuai aturan yang berlaku; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan masyarakat; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, berusaha untuk mencapai hasil objektif dalam tiap kinerja pemerintah, karena



kinerja pemerintah harus didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tuntutan Masyarakat di E-Government

Baru saja dapat kita lihat di masa awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah melakukan rencana terobosan dalam melakukan hal yang berbeda pada penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Terobosan itu adalah penyaluran yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi sebagai mediana. Ide Pemerintah tersebut disamping mengadakan kartu-kartu kesejahteraan rakyat diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga adalah dengan membuat Kartu Simpanan Sejahtera dimana pada kartu tersebut terdapat SIM Card yang nantinya akan dijadikan media e-money atau rekening handphone. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa SIM card tersebut berfungsi juga sebagai nomor handphone yang nantinya akan digunakan sebagai nomor rekening tujuan untuk dikirim sejumlah dana pembayaran kompensasi BBM, yang kemudian masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan mulai dari pengecekan saldo hingga mencairkan pada tempat-tempat resmi yang telah ditunjuk. Selain contoh diatas tadi, kita mungkin masih ingat saat ramainya masyarakat berbondong-bondong mendaftar E-KTP. Dari Sabang sampai Merauke masyarakat dilibatkan untuk berperan serta aktif mendaftar dan membuat E-KTP.

Kemudian juga, di tahun 2014 ini seluruh proses registrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan memanfaatkan media internet. Terobosan-terobosan tersebut kiranya dapat mewakili pengertian sederhana tentang apa itu E-government. Munculnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan kesempatan yang luas kepada publik untuk mengontrol pemerintah dan telah membuat manajemen informasi yang lebih baik. Sistem komputerisasi telah membantu pemerintah mengelola informasi. Internet dan semua bentuk komunikasi digital lainnya telah menjadi instrument yang penting dalam semua sektor. Demikian juga di sektor publik, media elektronik ini telah menjadi instrument yang penting dalam komunikasi. Penggunaan jaringan internet telah mempercepat proses komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Waktu tunggu untuk memperoleh informasi semakin singkat, dan aliran data dari satu unit ke unit instansi atau organisasi lain mengalami peningkatan. Munculah istilah e-government atau yang juga sering disingkat e-government saja.

Mengenai definisi e-government sendiri, di Indonesia konotasi tentang E-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Dalam kaidah internasional, (The World Bank Group, 2001) mendefinisikan e-government sebagai berikut: "E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Dari definisi yang sangat umum ini, dapat dilihat bahwa e-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan efektif.

Dalam banyak literatur, e-government juga dikaitkan dengan konsep digital government atau online government dan biasanya dibahas dalam konteks transformational government. Inti dari pengertian ini adalah penggunaan teknologi internet yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat, pelaku bisnis dan tentunya pihak pemerintah sendiri. Dalam hal ini harus diingat bahwa yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, bahwa e-government bukan sekedar pemakaian teknologinya tetapi juga keharusan bahwa pemanfaatan teknologi membuat sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik akan lebih baik.

Warga Negara Indonesia sangat mengharapkan Pemerintahan yang transparan, terbuka, kuat dan berwibawa. Penerapan e-government yang baik harus dilakukan dalam rangka mengedepankan tujuan mulia untuk meningkatkan pelayanan publik. Masa transisi dari cara lama ke era digital memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kemudian sosialisasi terhadap masyarakat agar memahami e-government dengan tujuan memperoleh fasilitas pelayanan dari pemerintah. Tahapan-tahapan ini perlu dilakukan dalam mewujudkan hak-hak warga dalam memperoleh akses layanan kapanpun dibutuhkan. Menurut Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi empat:

1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.



2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam website pemerintah.

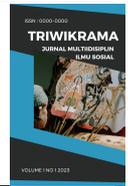
3. Transaction, yaitu selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.

4. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dijelaskan bahwa penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup: 1. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan; 2. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki; 3. Kondisi kegiatan layanan saat ini; 4. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan e-Government secara nasional.

Keterlibatan Masyarakat dan Pengawasan Eksternal: Akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Löffler (2005) berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Administrasi publik di Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan, tantangan tentang etika dan akuntabilitas, mulai dari birokrasi yang kompleks hingga korupsi yang merajalela. Namun, dengan menerapkan etika administrasi publik yang tepat, e government dapat dicapai untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, birokrasi yang kompleks dan tidak efisien menjadi salah satu tantangan utama administrasi publik di Indonesia. Hal ini terbukti dari indeks birokrasi yang dirilis oleh Bank Dunia, di mana Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara pada tahun 2020. Namun, dengan menerapkan etika administrasi publik yang benar, birokrasi dapat dirombak dan ditingkatkan efisiensinya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kedua, korupsi yang merajalela juga menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Transparency International pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara dalam hal persepsi korupsi.



Namun, dengan menerapkan etika administrasi publik yang baik, korupsi dapat dikurangi dan e government dapat dicapai. Penerapan etika administrasi publik adalah kunci penting dalam membangun e government yang baik. Pentingnya etika ini tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri akan tetapi masyarakat luas. Etika ini termasuk salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, karena nilai moral itu terdapat di rangkaian proses kegiatan pelayanan publik.

Etika administrasi publik adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku para pejabat dan pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan, akuntabel, adil, dan efektif dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat.

Ketika etika administrasi publik diterapkan dengan baik, maka good governance dapat terwujud. Hal ini karena etika administrasi publik membantu menghindari terjadinya tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dan membantu meningkatkan kinerja pegawai pemerintah, sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih baik.

Dalam membangun good governance, penting untuk memperhatikan lima nilai dasar yaitu akuntabilitas, partisipasi publik, transparansi, responsivitas, dan konsensus orientasi. Etika administrasi publik membantu mewujudkan kelima nilai tersebut. Misalnya, etika administrasi publik memastikan bahwa para pejabat dan pegawai pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan bahwa mereka melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Etika administrasi publik juga memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara terbuka dan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat.

Selain itu, berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika administrasi publik yang baik dalam menjalankan tanggung jawab pada pelayanan publik:

1. Menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Semua warga negara harus diperlakukan dengan cara yang sama dan diberikan layanan yang setara, tanpa diskriminasi
2. Memastikan profesionalitas dan integritas administrator publik. Administrator harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta menjalankannya dengan integritas dan transparansi. Mereka harus menghindari tindakan yang tidak etis, seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi.
3. Menerapkan transparansi dalam setiap kegiatan pelayanan publik. Administrator publik harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang



kebijakan dan program pemerintah, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

4. Memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Administrator publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah yang mengutamakan etika dan akuntabilitas akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini karena ketika pemerintah bekerja dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai. Etika yang baik dalam administrasi publik memastikan bahwa pejabat pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Sementara itu, akuntabilitas membuat pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik dalam hal kebijakan maupun penggunaan anggaran.

Dengan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberi masukan, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Ketika pemerintah memperlihatkan bahwa mereka bekerja dengan integritas, dan selalu mengutamakan keadilan dan transparansi, maka tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dapat terpenuhi. Sebagai hasilnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih harmonis, dan kepercayaan publik pun semakin kokoh.

Transparansi dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui platform e-government akurat, jelas, dan mudah diakses. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Publik Berikan pelatihan kepada pegawai negeri atau pejabat publik mengenai penggunaan teknologi digital yang etis dan akuntabel. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Ciptakan kanal komunikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan saran atau keluhan terkait layanan e-government. Membangun Kepercayaan Melalui Akuntabilitas. Tindaklanjuti setiap laporan atau keluhan dari masyarakat secara transparan dan tepat waktu. Gunakan teknologi seperti blockchain untuk mencatat dan melacak proses administrasi sehingga lebih sulit bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi.



DAFTAR ISI

- Jufita, T., & Meini, Z. (2022). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PANDEMI COVID 19 TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN. *ECOBESTHA*, 1, 181-184.
- Meini, Z., & Istikharoh, I. (2022). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *AkunNas*, 19(1), 28-42.
- Engkus, Ainyana Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Fiarta18April(2023)Kompasiana<https://www.kompasiana.com/fiartha8642/643e1f374adde40a770b573/mengatasi-tantangan-administrasi-publik-di-indonesia-bagaimana-etika-memainkan-peran-pentingnya-dalam-membentuk-good-governance>
- Lewis, C. W., & Gilman, S. C. (2012). *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Solomon, R. C. (1987). *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Wisok, P. Y. (2009). *Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian*. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Gie, T. L. (2006). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing.